

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara Pridenestrovia atau sering dikenal sebagai negara Transnistria merupakan negara yang terletak di bagian kawasan wilayah Eropa Timur, negara ini terletak berbatasan dengan negara Ukraina dan juga negara Moldova.<sup>1</sup> Dalam catatan kedaulatan sebuah negara di dunia internasional, Transnistria merupakan negara yang hanya memiliki kedaulatan secara de facto dan tidak memiliki kedaulatan secara de jure di dalam hukum internasional. Walau hanya memiliki pengakuan secara de facto, Transnistria memiliki ibu kota negara mereka sendiri, yakni kota Tiraspol, serta memiliki bendera nasional, tentara, kepolisian, mata uang dan juga bahkan parlemen pemerintahan. Kedaulatan de facto yang dimiliki Transnistria berakar masalahkan dengan konflik separatisme yang dilakukan Transnistria terhadap negara Moldova. Konflik Transnistria merupakan konflik yang terletak di kawasan Moldova—yakni kawasan wilayah Bessarabia dan kawasan Transnistria. Pada tahun 1812, Imperial Rusia merebut Bessarabia yang memiliki bahasa Rumania tepi barat sungai Destr dari kekuasaan Ottoman.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Troebst, S. (2003). 'We are Transnistrians! Post-Soviet identity management in the Dneistr Valley', vol. 1, no.4

<sup>2</sup> Troebst, S. (2002). 'The Transnistrian Moldovan Republic: from conflict driven state building to state driven nation building'. European Yearbook of Minority Issues, Vol. 2, 5-30.

Setelah Pemeritahan Rusia dipaksa untuk menyerahkan Bessarabia kembali ke Rumania pada akhir Perang Dunia I, kepemimpinan Uni Soviet menciptakan MASSR (*Moldavian Autonomous Soviet Socialist Republic*) di bagian wilayah timur sungai sebagai klaim irredentist.<sup>3</sup> Pada Perang Dunia II, pemerintahan Rusia mengambil kembali kekuasaan wilayah Bessarabia dengan menggabungkan kedua sisi bagian sungai dengan sebutan MSSR (*Moldavian Soviet Socialist Republic*) atau Republik Sosialis Soviet Moldova dengan menempatkan Kishinev sebagai ibu kota. Kedua wilayah tersebut merupakan bagian kawasan wilayah negara Rumania.<sup>4</sup> Namun meskipun kedua wilayah yang berada dalam kawasan Rumania, tidak menjadikan kwasan Transnistria juga memiliki hubungan dekat dengan Rumania, sebaliknya Transnitria memilih lebih untuk memiliki hubungan dekat dengan Ukraina di bawah pemerintahan Uni Soviet kala itu—dengan Transnistria sebagai MASSR (*Moldavian Autonomous Soviet Socialist Republic*) dan Bessaribia sebagai MSSR (*Moldavian Soviet Socialist Republic*).<sup>5</sup> Namun, pada tahun 1986 Uni Soviet mengalami peristiwa Parestorika yang mengakibatkan bubarnya Uni Soviet. Dalam peristiwa ini banyak kawasan naungan Uni Soviet memilih untuk memerdekakan diri, politisi Moldova mendeklarasikan republik Soviet yang terpisah pada 2 September 1990.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Nantoi, O. (2015). *The East Zone Conflict in the Republic of Moldova: a New Approach*. Chisinau: Institute for Public Policies.

<sup>4</sup> Nescutu, M. (2019, May 29). Breakaway Transnistria threatens to Moldova for ‘War Crimes. Dipetik Agustus 25, 2023, dari *BalkanInsight*: <https://balkaninsight.com/2019/05/29/breakaway-transnistria-threatens-to-sue-moldova-for-war-crimes>

<sup>5</sup> *ibid*

<sup>6</sup> HIR. (2021, May 21). Dipetik Agustus 25, 2023, dari *The Transnistrian Gambit: Russia in Moldova*: <https://hir.harvard.edu/the-transnistrian-gambit-russia-in-moldova>

Transnistria, yang juga mendukung kudeta yang dilakukan Moldova juga merasa ingin dengan mendeklarasikan kemerdekaan dari Moldova. Pada tahun 1992, bentrokan lokal antara polisi Moldova dan milisi Transnistrian meningkat menjadi perang saudara yang memakan korban lebih dari 1.000 jiwa. Relawan Rumania bergabung dengan Moldova sementara Cossack Ukraina dan elemen Angkatan Darat ke-14 Rusia mendukung Transnistrian.<sup>7</sup> Sejak itu, gencatan senjata terus berlanjut. Rusia, Moldova, dan Transnistria masing-masing menyumbangkan 500 tentara ke Komisi Multilateral, yang berbasis di Bendery dalam menegakkan perdamaian. Upaya untuk memecahkan dilema politik telah menghasilkan terminologi penyelesaian yang disarankan seperti "special status" atau "common state," tetapi kemudian resolusi tersebut tetap tidak berjalan sesuai yang diharapkan. (Borsi, 2007) Kawasan Transnistria—atau wilayah MASSR (*Moldavian Autonomous Soviet Socialist Republic*)—yang awalnya wilayah gabungan yang dilakukan oleh Uni Soviet menyatakan tetap ingin memerdekakan diri dari Moldova. Transnistria melakukan separatisme dengan melakukan gerakan yang berujung dengan konflik penolakan yang dilakukan oleh pemerintahan Moldova.

Penolakan yang dilakukan oleh pemerintahan Moldova bukanlah tanpa sebab, wilayah Transnistria atau bagian wilayah timur MASSR merupakan wilayah dengan perkembangan industri untuk negara Moldova. Wilayah Transnistria merupakan wilayah yang menghasilkan 40 persen produk nasional Moldova dan wilayah pemasok 90 persen listrik Moldova. Dalam hal yang lebih lanjut,

---

<sup>7</sup> Borsi, M. (2007). Transnistria: an unrecognized country within Moldova. *Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe*, Vol. 10, No. 4, 45-50.

Transnistria melakukan upaya perlawanan dengan berusaha memerdekakan diri menjadi negara yang berdaulat di PBB tahun 1992, namun permohonan Transnistria sebagai negara ditolak oleh PBB dan masih tercatat sebagai kawasan kedaulatan Republik Moldova.<sup>8</sup>

Perang yang terjadi antar Moldova dengan Transnistria menjadikan dunia internasional untuk turut serta dalam berusaha memecahkan konflik. Banyak bentuk pencegahan dan negosiasi yang dilakukan oleh berbagai kalangan berwenang dalam upaya kedamaian. Namun dalam beragam pembentukan negosiasi tersebut tetap tidak menjadikan kedua kubu dapat menemui titik temu. Untuk itu kemudian terjadi berbagai upaya penyelesaian konflik dilakukan— yang upaya-upaya ini berfokuskan banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang, termasuk juga dengan UE sebagai organisasi internasional yang mengutamakan perdamaian terjadi di dunia terutama dengan perdamaian di dalam kawasan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang masalah yang sudah penulis jelaskan mengenai konflik Moldova-Transnistria, dan awal bagaimana keterlibatan EUBAM pada konflik Moldova-Transnistria bermula maka rumusan masalah yang penulis gunakan adalah **“Bagaimana peran UE melalui EUBAM dalam Resolusi Konflik Moldova-Transnistria pada tahun 2005-2010?”** dan berikut adalah justifikasi yang penulis berikan dalam rumusan masalah yang akan digunakan:

---

<sup>8</sup> Bahchel. (2004). *De facto States: The Quest for Sovereignty*. London: Routledge.

Terdapat beberapa kasus ‘unsolved’ yang ditangani oleh EU, konflik Moldova-Transnistria merupakan kasus konflik yang memiliki tingkat urgensi yang rendah apabila dibandingkan dengan beberapa kasus yang tengah ditangani.<sup>9</sup> Konflik yang tidak berakibatkan dengan pelanggaran krusial dan fatal HAM yang mengawatirkan tetap menjadi faktor keikutsertaan dan terbentuknya EUBAM dalam penanganan konflik Moldova-Transnistria menjadikan penulis untuk menganalisa lebih lanjut bagaimana peran EU melalui EUBAM dalam permasalahan konflik tersebut.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Secara umum, tujuan penelitian ini digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam pemenuhan program sarjana S1 Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas ‘Veteran’ Jawa Timur.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran UE dalam melalui badan EUBAM dengan agenda usaha resolusi konfliknya terhadap konflik Moldova-Transnistria dan penulis juga akan menjelaskan bagaimana mandat-mandat yang telah diberikan UE terhadap EUBAM tersebut berkaitan dengan konsep konflik resolusi dengan penganalisan antar mandat-mandat tersebut dengan indikator-indikator yang akan dibahas. Tidak hanya dengan

---

<sup>9</sup> OSCE. (2006 , June 18). Dipetik Agustus 25, 2023, dari OSCE Special Representative encourages leadership in Chisanau and Tiraspol to focus on constructive forward-looking dialogue: <https://www.osce.org/mission-to-moldova/119488>

hal tersebut, penelitian ini juga bertujuan untuk diharapkan dapat memberikan referensi yang lebih untuk pembahasan topik terkait di masa mendatang.

## **1.4 Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Landasan Teori dan Konseptual**

#### **1.4.1.1 Peran Organisasi Internasional**

Dalam penjelasannya mengenai konsep peran organisasi internasional Archer menjelaskan terdapat tiga peranan yang menjelaskan setiap masing-masing peran keterlibatan sebuah organisasi internasional di dunia internasional, peran tersebut menjadi tiga peran, yakni; peran sebagai instrumen, sebagai arena, dan sebagai aktor.<sup>10</sup>

Penjelasan peran yang pertama adalah peran sebagai instrumen, dalam penjelasan peran OI sebagai instrumen Archer menggambarkan bahwa organisasi internasional digunakan sebagai perantara atau instrumen bagi para anggotanya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hal ini biasa dimiliki oleh organisasi internasional yang sebagian besar anggotanya adalah negara-negara berdaulat yang memiliki kekuasaan untuk membatasi setiap tindakan dan keputusan sebuah organisasi internasional. Organisasi internasional yang memiliki peran sebagai instrumen dari anggotanya memiliki kecenderungan tidak bisa menentukan tindakan atau kebijakan dengan independen dan tanpa pengaruh kekuasaan anggota negara berdaulat. Organisasi internasional yang memiliki peran sebagai instrumen

---

<sup>10</sup> Archer, C. (2001). Roles of International Organization. Dalam C. Archer, International Organization (hal. 68-92). London and New York: Routledge.

memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan nasional sebuah negara sejauh koordinasi multilateral antar anggota.<sup>11</sup>

Untuk menggambarkan organisasi internasional yang berfungsi sebagai instrumen Archer menjelaskan bahwa keanggotaan dari organisasi tersebut tidak berartikan bahwa setiap keputusan yang dibuat harus dapat dijelaskan dalam hal memenuhi kepentingan setiap anggota. Sebuah instrumen mendemonstrasikan tujuannya jika menunjukkan kegunaannya selama periode waktu tertentu kepada mereka yang telah menjalankannya, kepuasan anggota dalam suatu organisasi internasional tetap tidak boleh dipandang rendah atau dilemahkan ketika anggota lain menggunakan instrumen tersebut dan tidak diubah menjadi senjata yang merugikan bagi anggota negara-negara yang telah berdaulat.

Untuk peran yang berikutnya dalam peranan organisasi internasional menurut Archer adalah peran organisasi internasional sebagai arena atau forum, dimana tempat dari setiap tindakan kebijakan sebuah organisasi internasional tersebut terjadi. Dalam hal ini, organisasi menyediakan sebuah wadah atau tempat pertemuan bagi anggota-anggota terkait untuk berkumpul, berdiskusi, bekerjasama atau dengan pembahasan sebuah konflik. Arena dalam pengertian ini memiliki makna sebagai wilayah yang netral; sebuah organisasi internasional yang menjadi tempat untuk berkumpul dalam pembahasan diskusi kerjasama atau sebuah konflik dituntut untuk bersifat netral dan tidak memihak maupun bias terhadap salah satu anggota atau pihak yang terkait. Organisasi internasional yang memiliki peran

---

<sup>11</sup> Archer, C. (2001). *International Organization* third edition. London: Routledge

sebagai arena diperlukan dalam memenuhi peran vital dalam melayani pertemuan, menyiapkan dokumen, memberikan solusi atau masukkan dalam diskusi sebuah konflik yang tengah terjadi di antara pihak terkait.<sup>12</sup>

Untuk peran yang ketiga adalah peran organisasi internasional sebagai aktor. Penggambaran organisasi internasional yang berperan sebagai aktor memiliki karakteristik organisasi yang bersifat independen. Makna dari kata independen tersebut dijelaskan Archer sebagai bahwa organisasi yang memiliki peran tersebut dapat bertindak maupun membuat kebijakan di kancah dunia internasional tanpa terpengaruh secara signifikan oleh pengaruh kekuatan pihak luar dari organisasi itu sendiri. Kapasitas sebuah organisasi internasional dapat diperankan sebagai aktor bergantung pada resolusi, rekomendasi, atau perintah yang berasal dari kekuatan lembaganya.

Kekuatan lembaga yang diartikan bahwa organisasi tersebut dapat mewakili sebuah organisasi yang dapat mengambil keputusan sendiri, dapat tetap bertindak dan mengeluarkan kebijakan walau bertentangan dengan keinginan sebagian anggota dan dapat mempengaruhi tindakan kepada anggota di dalamnya. Peran organisasi internasional sebagai aktor ini juga secara kolektif berpengaruh pada sistem dunia internasional karena pengambilan keputusan mereka yang bisa dilakukan secara independen, setiap kasus diputuskan oleh standar hukum internasional tidak berdasarkan oleh campuran hukum nasional dari salah satu anggota yang berpengaruh di dalamnya. Dengan perannya yang bersifat independen

---

<sup>12</sup> ibid



sering organisasi ini melibatkan peran mereka dalam operasi penjaga kedamaian di dunia internasional, hal ini didasarkan dengan tingkat kemandirian suatu organisasi dengan tingkat efektifitas yang tidak selalu diimbangi oleh suatu keputusan negara yang hal tersebut akan berpeluang besar untuk memberikan keputusan yang bersifat bias dan kemampuan organisasi tersebut dalam *'to give effect to it's decision'* dalam perundingan kedamaian.<sup>13</sup>

Dari penjelasan mengenai peran organisasi internasional yang digambarkan oleh Archer tersebut, dalam skripsi ini penulis memiliki paham bahwa dari ketiga teori peran yang dijelaskan hanya terdapat satu peran organisasi internasional yang berkaitan dengan pembahasan studi kasus yang penulis akan bahas; yakni peran organisasi internasional sebagai aktor. Penulis memilih peran dilakukan penulis juga berdasarkan dengan data-data yang selama ini penulis terima, keterlibatan peran UE yang terlibat dalam proses diskusi pemecahan masalah konflik Moldova-Transnistria dengan adanya beberapa aksi pendekatan yang dilakukan dan terbentuknya EUBAM disertai dengan mandat- mandat yang disusun sebagai badan yang ditunjuk dalam pencapaian resolusi, penulis cerminkan beberapa hal yang disebutkan tersebut merupakan sebagai cerminan keterlibatan peran UE sebagai aktor di dalamnya.

#### **1.4.1.2 Fase Konflik dan Peran Organisasi Internasional**

Sebagian besar organisasi internasional beroperasi dengan tujuan memberikan keuntungan, manfaat, dan keamanan kepada anggotanya, terutama dalam upaya mencapai perdamaian. Dengan memposisikan OI mereka sebagai

---

<sup>13</sup> ibid

mediator atau pemecah masalah dalam konflik yang sedang berlangsung, organisasi-organisasi ini memanfaatkan struktur dan peran mereka yang ada untuk mendorong penyelesaian dan mengurangi adanya konflik

Dalam bukunya yang berjudul “*International Organizations: Their Role in Conflict Management*” Thruelsen mengeksplorasi berbagai perspektif tentang peran organisasi internasional dalam tatanan global. Thruelsen sejalan dengan perspektif bahwa organisasi-organisasi ini memainkan peran penting dalam mempromosikan perdamaian dan keamanan dengan mengelola konflik secara efektif yang penting dalam aspek perdamaian dan keamanan dalam upaya penanganan adanya konflik yang terjadi di dunia Internasional.<sup>14</sup>

Pendekatan dalam manajemen konflik telah menyebabkan meningkatnya meningkatnya upaya penyelesaian konflik melalui negosiasi dibandingkan peperangan, dan organisasi-organisasi internasional mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam menengahi perselisihan-perselisihan ini. Namun, rumitnya konflik modern dan penanganannya menghadirkan tantangan besar terhadap struktur, sumber daya, dan peran banyak organisasi internasional yang terlibat. Pendekatan umum dalam mempelajari manajemen konflik melibatkan pengkategorian wilayah konflik ke dalam fase-fase berbeda, yang masing-masing memiliki karakteristik unik.

---

<sup>14</sup> Thruelsen, P. D. (2009). *International Organisations: Their Role in Conflict Management*. Dalam P.D. (ed.), *International Organisation: Their Role in Conflict Management* (hal. Copenhagen). 13-23: Royal Danish Defence College.

Siklus konflik yang komprehensif biasanya melibatkan berbagai fase konflik yang berkembang ke berbagai arah. Penting untuk menyadari bahwa konflik bukanlah fenomena yang seragam; sebaliknya, hal ini bermanifestasi dengan karakteristik yang beragam pada tahapan yang berbeda.<sup>15</sup>

Strategi pencegahan konflik struktural berfokus pada mengatasi penyebab utama konflik tertentu. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendasar manusia, termasuk kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, atau pembangunan. Selama periode pasca-konflik, upaya untuk mencegah konflik struktural biasanya dilakukan melalui koordinasi dengan aktor-aktor negara dan organisasi internasional. Tujuannya adalah untuk mendukung upaya pembangunan bangsa dan mencegah konflik dan peperangan di panggung global, yang sering kali ditandai dengan berbagai indikator terkait. Dalam penjelasan ini Thruelsen menjelaskan adanya 5 fase konflik.<sup>16</sup>

Fase yang pertama adalah fase *potential conflict*, tahap awal yang disebut dengan tahap potensi konflik ditandai dengan adanya faktor-faktor mendasar atau katalisator yang berpotensi memicu konflik. Faktor-faktor ini mencakup spektrum dinamika sosial-ekonomi, politik, dan budaya, termasuk namun tidak terbatas pada kemiskinan, ketegangan agama, fragmentasi politik, dan menipisnya sumber daya yang terkait dengan agama, budaya, atau etnis. Terlebih lagi, fase ini sering kali menggarisbawahi ketidakmampuan secara efektif mengelola ketegangan yang timbul dari kesenjangan antar kelompok etnis atau budaya.

---

<sup>15</sup> ibid

<sup>16</sup> ibid

Pada saat kritis inilah langkah-langkah proaktif untuk pencegahan konflik struktural dapat diterapkan untuk mencegah eskalasi dinamika konflik seperti *poverty alleviation horizontal inequality, by promoting good governance, civil society*.

Beranjak ke tahap berikutnya fase *gestation of conflict*, berbagai aktor menjadi semakin termobilisasi menuju konflik, sering kali disertai dengan tindakan represi kecil. Meskipun konflik belum sepenuhnya meletus, terdapat peningkatan nyata dalam upaya mobilisasi. Intervensi operasional pada fase ini, yang diklasifikasikan dalam pengelolaan dan pencegahan konflik, memprioritaskan taktik pada tingkat intensitas yang lebih rendah. Hal ini dapat mencakup langkah-langkah seperti pengendalian senjata, inisiatif pemeliharaan perdamaian preventif, advokasi untuk kebebasan pers dan hak asasi manusia, serta mendorong dialog dan kolaborasi di antara pihak-pihak yang berkonflik.

Untuk tahapan ketiga adalah fase *mobilisation of conflict*, ketegangan mencapai puncaknya dengan meningkatnya konfrontasi di antara pihak-pihak yang terlibat pada tahap-tahap sebelumnya. Thruelsen menjelaskan bahwa selama masa kritis ini, inisiatif organisasi internasional untuk pencegahan konflik diarahkan untuk menghentikan eskalasi lebih lanjut. Upaya-upaya ini mencakup serangkaian langkah-langkah, termasuk tindakan pencegahan oleh badan-badan regional dan global, fasilitasi upaya mediasi internasional, keterlibatan dalam saluran dialog informal, negosiasi dan implementasi perjanjian keamanan, serta penempatan pengamat untuk memantau situasi di wilayah konflik.

Beralih ke tahap keempat fase *armed conflict*, kekerasan meningkat hingga mencapai tingkat konfrontasi bersenjata penuh, yang mengakibatkan meluasnya pelanggaran hak asasi manusia, keadaan darurat kemanusiaan, pengungsian massal warga sipil, dan munculnya faksi-faksi yang saling bertikai. Kecaman dari komunitas internasional sangat cepat, dan mendesak penghentian permusuhan segera. Sebagai upaya terakhir, langkah-langkah penegakan perdamaian dapat dilakukan ketika semua cara lain telah habis dan entitas eksternal yang kuat, biasanya negara atau organisasi regional/internasional, bersedia menggunakan kekuatan untuk meredam konflik. Langkah-langkah ini mencakup inisiatif seperti upaya mediasi dan konsiliasi yang difasilitasi oleh utusan khusus yang ditunjuk oleh badan-badan regional atau internasional, penerapan embargo senjata, pembentukan zona demiliterisasi, pelaksanaan operasi penegakan perdamaian, dan kecaman diplomatik atas tindakan pihak-pihak yang berkonflik.

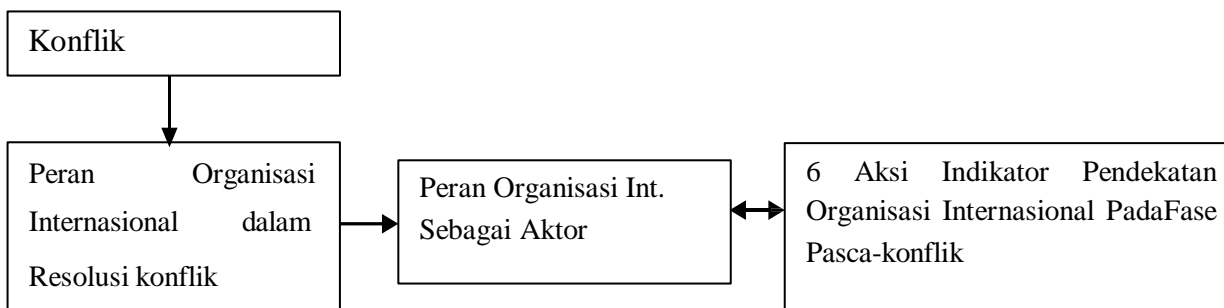
Berdasarkan yang dijelaskan Thruelsen fase *post-conflict* atau pasca-konflik, integrasi pencegahan struktural dan operasional untuk memastikan efektivitas upaya pembangunan perdamaian yang berkelanjutan. Komponen utama dari fase ini mencakup implementasi program demobilisasi, perlucutan senjata, dan reintegrasi, serta upaya untuk memperkuat pembentukan lembaga-lembaga politik yang kuat, pengerahan pasukan penjaga perdamaian, penegakan perjanjian perdamaian, reformasi sektor keamanan, inisiatif rekonstruksi ekonomi, dan promosi perdamaian. rekonsiliasi sosial, dan peningkatan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Dari penjelasan kelima fase dan keterkaitan indikator tindakan pencegahan konflik yang dilakukan oleh sebuah organisasi internasional tersebut, penulis memiliki

pandangan bahwa untuk penggunaan indikator yang akan digunakan dalam skripsi ini hanya akan melibatkan satu fase dengan penggunaan indikator didalamnya, yakni penggunaan indikator di dalam fase *post conflict*. Alasan dari penulis untuk hanya menggunakan satu fase indikator dari kelima fase tersebut didasarkan dengan kesesuaian dinamika konflik yang terjadi di Moldova-Transnistria semasa periode terlibatnya peran UE dan EUBAM, dimana keterlibatan tersebut terjadi setelah terjadinya konflik yang terjadi di Moldova- Transnistria. Berikut adalah gambaran skema indikator yang akan penulis gunakan.

Phase	Measures	
<b>Post Conflict</b> Gestation of Hosilities	Structural and Operational Post- Conflict-Peace- Building	Dukungan untuk pembentukan institusi politik, Pasukan penjaga perdamaian dan Penegakan perdamaian, Reformasi sektor Keamanan, Rekonstruksi ekonomi, Rekonsiliasi sosial, dan Pembangunan kapasitas kelembagaan

### 1.5 Sintesa Pemikiran



Dalam penjelasan skema sintesa pemikiran tersebut, munculnya sebuah konflik yang terjadi dalam suatu kawasan negara di dunia internasional memberikan adanya sebuah peluang bagi organisasi internasional untuk melakukan keterlibatan dalam usaha penyelesaian konflik tersebut. Keterlibatan peran organisasi internasional dalam sebuah konflik yang tidak kunjung terselesaikan menjadi salah satu faktor mengapa terjadinya kelibatan peran organisasi internasional dalam agenda resolusi konflik. Tidak hanya dengan faktor konflik yang tak kunjung dapat diselesaikan, namun terlibatnya organisasi internasional dalam peran mereka di resolusi konflik juga berdasarkan dari kebijakan organisasi internasional tersebut yang mengutamakan kedamaian sebagai salah satu tujuan agenda mereka didalamnya. Untuk peran organisasi internasional dalam resolusi konflik seperti yang telah dibahas dalam landasan teori, skripsi ini hanya menggunakan satu peran yang akan menjadi pembahasan, yakni dengan peran organisasi internasional sebagai aktor.

Pengambilan peran tersebut dalam fokus pembahasan skripsi ini berdasarkan persepsi pembahasan dalam penulis dalam mengkategorikan konsep peran organisasi internasional dengan sistem kerja dari organisasi internasional yang akan dibahas di skripsi ini. Penggunaan peran organisasi internasional tersebut juga penulis gunakan sebagai penunjang argumen utama penulis dalam pembahasan adanya organisasi EU sebagai aktor. Berlanjut dengan membahas peran organisasi internasional dalam resolusi konflik, maka pembahasan akan berlanjut pada aksi pendekatan apa saja yang dilakukan sebuah organisasi internasional dalam

melakukan agenda resolusi konfliknya. Dalam pembahasan aksi indikator tersebut memunculkan adanya 1 fase dari 5 fase kategori indikator yang digunakan oleh organisasi internasional dalam melakukan aksi pendekatan pasca-konflik yang terjadi di Moldova-Transnistria.

## **1.6 Argumen Utama**

Dengan adanya wilayah *EU Enlargement*, UE melakukan pendekatan terhadap Moldova yang merupakan negara perbatasan di kawasan timur *EU Enlargement* dalam kepentingan kedamaian. UE melakukan pendekatan dengan pengadaan EUBAM sebagai bentuk pentingnya permasalahan negara tetangga yang berkonflik dalam pembangunan penstabilan kawasan. Upaya UE dalam negara-negara tetangga tersebut juga termuat dalam ENP (*EU Neighborhood Policy*). Peran terlibatnya EUBAM sebagai badan yang ditunjuk dalam konflik Moldova-Transnistria merupakan sebagai bentuk demonstrasi EU yang berperan sebagai aktor dalam penjalanan ketetapan ENP dan pembangunan kestabilan kawasan dengan beberapa aksi pendekatan yang diagendakan dalam mandat EUBAM untuk resolusi konflik Moldova-Transnistria.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Dalam penggunaan metode tipe penelitian kualitatif dan penulis memilih untuk melakukan penelitian dengan metode deskriptif analistik yang dalam metode ini dihasilkan dengan penggambaran suatu fenomena atau kejadian yang tengah di



teliti dengan apa adanya dengan pemaparan fakta-fakta dari runtutan sistematis kejadian yang tengah diteliti tersebut secara akurat.<sup>17</sup>

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Untuk penggunaan jangkauan penelitian, penulis menggunakan jangkauan penelitian di tahun 2005-2010. Hal ini penulis gunakan berdasarkan dengan mandat tugas EUBAM yang pada tahun 2005 UE memberi mandat pertama kali kepada EUBAM untuk pelaksanaan kerja di Moldova, dan mandat tersebut membuahkan hasil baik terhadap hubungan antara negara Moldova dan Transnistria dengan terbangunnya saluran transportasi antara Chisinau dan Tiraspol.<sup>18</sup> Dari pertinjauan tersebut, penulis memilih tahun perpanjangan terakhir—yaitu tahun 2010—sebagai batas waktu jangka penelitian.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dengan penggunaan metode penelitian kualitatif maka dalam teknik pengumpulan data penulis melakukannya dengan pengumpulan metode library search secondary data dengan acuan data yang akan digunakan penulis dapat ditemukan seperti; penelitian terlebih dahulu, dokumen resmi, laporan website terkait, media massa, atau artikel-artikel internet yang sesuai dengan kredibilitas penunjang yang penulis butuhkan. Untuk sebagai salah satu contoh, penulis akan

---

<sup>17</sup> Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relation*. SAGE Publications.

<sup>18</sup> EUBAM: European Union Border Assistance Mission to Moldova. (t.thn.). Dipetik Agustus 25, 2023, dari EU Neighbours East: <https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/projects/eu-border-assistance-mission-republic-moldova-and-ukraine-eubam>

menggunakan data-data dari laporan resmi website EUBAM dan EU dalam kegiatan laporan mandat yang dilakukan.

#### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah deskriptif analistik dengan menjelaskan dan menganalisa hasil observasi kesesuaian data-data yang telah didapat dengan indikator-indikator yang telah dikumpulkan dan disebutkan oleh penulis dalam penjelasan indikator konflik resolusi untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.

#### **1.7.5 Sistematika Penulisan**

- **Bab I** berisikan pendahuluan dengan menjelaskan secara garis besar dari penelitian yang akan penulis lakukan—yang bab ini berisikan; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka berpikir landasan teori dan konseptual, sintesa pemikiran, argumen utama, dan metodologi data yang akan digunakan.

- **Bab II** berisikan penjelasan dasar-dasar dan faktor-faktor bagaimana kerja awal UE dalam upaya resolusi konflik terhadap konflik yang terjadi di Moldova-Transnistria dan bagaimana konsep awal kerja EUBAM (*European Union Assistance Border Mission to Moldova*) yang digunakan UE dalam pencapaian tujuan resolusi konflik yang diagendakan.

- **Bab III** berisikan dengan penjelasan mengenai peran apa saja yang telah dilakukan EUBAM dalam mandat resolusi konfliknya terhadap konflik Moldova-Transnistria. Penulis juga akan mengaitkan peran-peran dan mandat tersebut

dengan indikator-indikator konflik resolusi yang akan penulis teliti dan akan penulis kaitkan kembali aksi-aksi yang sesuai indikator tersebut dengan peran EU- EUBAM dalam konflik resolusi Moldova-Transnistria.

- **Bab IV** akan memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan juga menyertakan kritik ataupun saran